

**STUDI TENTANG KESIAPAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
DITINJAU DARI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**



TESIS

**Diajukan Kepada
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister dalam Ilmu Manajemen**

Oleh

TRIYANA

**N I M : P.100040071
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRIYANA
NIM : P. 100040071
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul Tesis : Studi Tentang Kesiapan Pemerintah Kota Surakarta
Dalam Rangka Otonomi Daerah ditinjau dari Pendapatan
dan Belanja Daerah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,

TRİYANA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali Imron: 104).
2. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S. Al Mujaadilah: 11).

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta
- Istriku dan kedua anakku, - Kakak-kakak dan adikku
- Rekan-rekan
- Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

DJOKO SUTianto, *PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA) KOTA SURAKARTA*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Surakarta, dan faktor manakah di antara kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Surakarta.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan jumlah responden 60 orang, selanjutnya data yang terkumpul diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi klasik untuk mengetahui bahwa kelayakan model regresi sebelum dilakukan uji hipotesis dengan uji regresi berganda. Pola hubungan regresi tersebut adalah $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$ atau : $KIN = b_0 + b_1KEP + b_2MOT + b_3KK + e$.

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan alat bantu program SPSS Versi 13 di dapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$KIN = 18,402 + 0,359 KEP + 0,419 MOT + 0,436 KK + e$$

Hasil analisis regresi diperoleh nilai beta standarized coefficients variabel kepemimpinan sebesar 0,447, sehingga dapat ditentukan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh yang dominan atau paling kuat terhadap kinerja pegawai karena nilai Beta Std yang paling tinggi, sedangkan pengaruh yang paling rendah adalah motivasi karena mempunyai nilai Beta Std yang paling kecil yaitu sebesar 0,317. Dari hasil uji serentak (Uji F) maka seluruh variabel baik variabel kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat kinerja pegawai pada Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Surakarta. Dapat juga dikatakan bahwa memang seluruh variabel yang penulis penggunaan benar-benar sebagai variabel penjelas terhadap kinerja. Semua variabel tersebut harus saling terintegrasi untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Keywords: Kepemimpinan, Motivasi, Kepuasan Kerja, Kinerja dan Bapeda Solo.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul *“PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA) KOTA SURAKARTA”* ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis sejak persiapan hingga tersusunnya tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Dr. M. Wahyuddin, MS. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Sekaligus selaku ketua Program Magister Manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Dr. Ir. Didik Purwadi, MEd, selaku Pembimbing , yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini dan sekaligus memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

4. Masrin Hadi, S. Sos, selaku Kepala Bapeda Kota Surakarta yang telah memberikan izin untuk tempat penelitian.
5. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian studi kepustakaan.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis berharap sekecil apa pun tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan.

Surakarta, Juli 2006

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tentu membawa dampak yang luas terhadap kehidupan tata Pemerintahan dan Tata Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing. Dalam kaitannya dengan belanja pembangunan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dirasa lebih aspiratif bagi daerah. dalam penentuan dana perimbangan, misalnya azas proporsionalitas, adil, transparan dan bertanggungjawab sangat diperhatikan, baik dalam hal pembagian kekayaan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan pembagian pendapatan atas sumber daya alam maupun dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU).

Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut juga membawa konsekuensi pada pertanggungjawaban daerah atas pengalokasian dana yang dimiliki. Adanya kenaikan penerimaan daerah, tentunya harus diimbangi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Berdasarkan pengalaman yang terjadi selama ini, pembelanjaan Pemerintah

Daerah belum menggunakan Standart Analisa Belanja (SAB) untuk mengukur kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga efisiensi dan efektifitasnya menjadi persoalan.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah junto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber – sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang – undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Pendapatan Daerah (langsung) pada hakekatnya diperoleh melalui pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horizontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diperlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan

beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber – sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber–sumber pendapatan lain yang sah serta sumber pembiayaan.

Dari uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian terhadap kesiapan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka menghadapi otonomi daerah dengan Judul: “STUDI TENTANG KESIAPAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH”

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang hendak diteliti melalui studi ini adalah:

1. Apakah Pemerintah Kota Surakarta siap menghadapi Otonomi Daerah ditinjau dari Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Apakah ada perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah Undang-undang otonomi Daerah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

1. PENDAPATAN, bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri atas Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan yang Sah.
 - b. Dana Perimbangan.
 - c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. BELANJA DAERAH, terdiri atas :
 - a. Belanja Administrasi Umum
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
 - c. Belanja Modal

Yang masing – masing dialokasikan pada Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik.
3. PEMBIAYAAN, yang terdiri atas :
 - a. Penerimaan
 - b. Pengeluaran

Dalam Penelitian ini, pembahasan terbatas pada kesiapan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka Otonomi Daerah ditinjau dari Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kota Surakarta dalam menghadapi otonomi daerah dilihat dari pendapatan dan belanja daerah.

2. Untuk mengetahui perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah.

E. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah :

1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta, diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan oleh Pemerintah Kota dalam hubungannya dengan penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dari segi ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan kajian dalam menentukan kesiapan Pemerintah Kota Surakarta menghadapi otonomi Daerah, juga sebagai masukan bagi peneliti lain yang akan mengkaji topik yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Thesis ini akan dibagi dalam 5 Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI.

Dalam Bab ini dibahas mengenai Konsep Dasar tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah serta Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Rencana Analisis Data.

BAB IV ANALISIS DATA

Dalam Bab ini berisikan Gambaran Umum Kota Surakarta serta Analisis data tentang kesiapan Pemerintah Kota dalam rangka otonomi daerah

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran